

Civitas akademika Program Studi Ilmu Pemerintahan UMM
MENGUCAPKAN SELAMAT DAN SUKSES
 kepada wisudawan dan wisudawati Periode III Tahun 2018
SEMOGA SUKSES DALAM MERAIH MASA DEPAN

Wisudawan/Wisudawati Prodi Ilmu Pemerintahan Periode III Tahun 2018



Aminudin Kalean
 201110050311034



Muhammad Azhar Farizi
 201110050311031



Lalu Tambahadi
 201110050311079



Gigih Arganata
 201210050311106



Zeby Satria
 201210050311045



Pascal Indra
 201210050311075



Lalu Muhammad Rinaldy
 201210050311065



Fredi Rico
 201310050311085



Arif Ramadhan
 201310050311057



Greta Osela P
 201310050311100



Megawati
 201310050311008



Felgi Ramadhani
 201310050311061



Edwin Riswandi
 201410050311147



Iwan Hasliansyah
 201410050311055



M. Yahya A.
 201410050311168



Silvy Novita Putri
 201410050311180



Zainuddin Idrus
 201110050311040

Pengarah Redaksi : Salahudin, S.IP, M.SI, M.PA
 Pemimpin Redaksi : Asep Nurjaman, Tri Sulistyandingsih, Krishna Hadi, Yana S. Hijri, Muhammad Kamil, Hevi Kurnia Hardini
 Redaktur Pelaksana : Ach. Apriyanto Romadhani
 Tata Usaha dan Dokumentasi : Jainuri, Prasetya Teruna
 Reporter : Lisriana Asworo, Idrhar Taqwa,

Diterbitkan oleh Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UMM
 Jl. Raya Tlogomas 246 Malang Telp. 0341 466318 Psw.131
 Website: pemerintahan.umm.ac.id Email: ipumm.28@gmail.com; pemumm86@gmail.com
 Redaksi menerima tulisan mahasiswa melalui karya tulis secara bebas, dinamis, dan kreatif.
 Penyerahan naskah tulisan dimulai pada acara wisuda sampai dua minggu sebelum wisuda periode berikutnya.



ProdIP News
 Program Studi Ilmu Pemerintahan
 FISIP-UMM
 Strengthening Effective Government



Diterbitkan Oleh Prodi Ilmu Pemerintahan
 Website: pemerintahan.umm.ac.id

Edisi III/TH XIV/Agustus/2018

Salam ProdIP News

Penguatan Kapasitas Internal Dengan Jaringan Institusi/Lembaga yang Lain

Pembaca Prodip News Edisi III 2018 yang budiman, pada salam edisi kali ini Program Studi Ilmu Pemerintahan (Prodi IP) FISIP UMM, dengan bangga menyampaikan beberapa kegiatan Prodi dalam kurun waktu Mei - Agustus 2018. Kegiatan tersebut antara lain Seminar Perkotaan dengan mengambil tema "Tata Kelola Kampung Warna-Warni Jodipan Yang Berkelanjutan". Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk menyambut kunjungan kerjasama antara Prodi Ilmu Pemerintahan (Prodi IP) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dengan Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh Makassar). Kegiatan lainnya antara lain Talkshow Politik Pemerintahan, Launching Government English Club (GEC), Kajian Keilmuan dan penandatanganan Kerjasama (MoU) Dengan Pemerintah Kabupaten Dompu

Prodi IP dalam pengembangannya tetap berusaha mengkombinasikan penguatan kapasitas internal (dosen dan mahasiswa) dengan jaringan institusi/lembaga yang lain. Perpaduan dua hal ini menjadi penting dalam era globalisasi teknologi dimana kapasitas dan jejaring menjadi kunci penting dalam keberhasilan pengembangan manusia. Prodi IP sangat mahfum bahwa pengembangan skill dan kompetensi Prodi perlu dielaborasi dengan relasi yang dibangun. Sebab itu berbagai aktivitas kerjasama dengan Pemerintah daerah dan kampus lain perlu terus digalakan. Kedepannya pertautan yang saling mendukung ini akan terus dilakukan oleh prodi IP melalui model-model kegiatan dan kerjasama yang lebih baik lagi. []

* Pengarah Redaksi,
 dan Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UMM.



Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan UMM
 Salahudin, S.IP, M.SI, M.PA

Government Science Activities

Prodi IP Teken Kerjasama (MoU) Dengan Pemerintah Kabupaten Dompu



Kaprodi IP UMM saat menerima Naskah MoU
 dari Bupati Kabupaten Dompu

Prodi Ilmu Pemerintahan kembali melebarkan kerjasama (MoU) dengan Pemerintah Daerah. Kali ini, Prodi Ilmu Pemerintahan menyepakati sejumlah kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Dompu. Kerjasama ini adalah tindak lanjut dari acara Seminar Nasional tentang "Peran Sinergitas Pemerintah Daerah dan Masyarakat Sipil dalam Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Berdaya Saing" yang diadakan oleh Forum Komunikasi Mahasiswa Pascasarjana dan Dosen (FKMPD) Bima-Dompu Malang bekerjasama dengan Prodi Ilmu Pemerintahan, Minggu (13/5), di Aula GKB 4, UMM.

Kerjasama ini langsung dihadiri

dan ditandatangani oleh Bupati Dompu, Drs.H. Bambang M. Yasin, dan Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan, Salahudin, S.IP, M.SI, M.PA. Nota Kesepahaman antara Prodi Ilmu Pemerintahan dengan Pemerintah Kabupaten Dompu meliputi bidang Penelitian, Pengabdian, serta Magang Riset. Harapannya, sebagai lembaga pendidikan, Prodi Ilmu Pemerintahan bisa ikut berkontribusi membangun daerah, sekaligus membangun bangsa dan negara Indonesia. Penandatanganan Kesepakatan ini juga dihadiri oleh Dekan FISIP, Dr. Rinikso Kartono, M.Si, yang sekaligus membuka acara Seminar Nasional. []

Kembali, Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan Menjadi Juri Evaluasi Kinerja Camat 2018 se-Kota Malang

Bertempat di ruang Sidang Balai Kota Malang, Drs. Krishno Hadi, MA, dosen Prodi Ilmu Pemerintahan, kembali menjadi Juri Evaluasi Kinerja Camat se-Kota Malang dalam Otonomi Award 2018 (Senin, 4/6). Sebelumnya, dosen yang concern dalam bidang Pembangunan Daerah ini juga menjadi juri dalam Penilaian Kinerja Kelurahan se-Kota Malang. Evaluasi Kinerja Camat sendiri merupakan agenda yang bersifat periodik untuk mengukur, memantau, serta mengevaluasi kinerja kecamatan selama satu tahun. Evaluasi Kinerja Camat juga dihadiri oleh Pjs. Walikota yang sekaligus membuka acara tersebut.



Dosen IP UMM (Drs. Krishno Hadi, MA) saat menjadi TIM Penilai Peserta Otonomi Award 2018 se Kota Malang

Tentunya, kehadiran Pak Krish, sapaan akrab Dosen Krishno Hadi, sebagai juri di acara bergengsi tersebut menjadi pembuktian kepada khalayak umum bahwa Prodi Ilmu Pemerintahan UMM, adalah salah satu Prodi yang memiliki *track record* istimewa di mata publik. Prodi Ilmu Pemerintahan merupakan Prodi unggulan yang memiliki tenaga-tenaga pengajar profesional dan memiliki kredibilitas tinggi di mata publik.

Terbuktinya dengan digandengnya Dosen Krishno menjadi Tim Juri Evaluasi Kelurahan-Kecamatan beberapa tahun oleh Pemerintah Kota Malang. []

Sambut Kunjungan Unismuh Makassar, Prodi IP Gelar Seminar Tata Kelola Perkotaan

Kerjasama antara Prodi Ilmu Pemerintahan (Prodi IP) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dengan Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh Makassar) semakin erat. Kerjasama antara dua Universitas Muhammadiyah ternama ini direalisasikan dengan kunjungan Unismuh Makassar ke UMM (Sabtu, 7/7). Prodi IP menyambut kedatangan Prodi IP Unismuh Makassar dengan menggelar Seminar bertajuk "Tata Kelola Kampung Warna-Warni Jodipan Yang Berkelanjutan".

Seminar ini mendatangkan praktisi dan akademisi yang concern dalam bidang Tata Kelola Perkotaan, yakni Arif Budi Ananta, ST, Kasubid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan



Kaprodi IP UMM bersama Kaprodi IP Unismuh Makassar

Kota Malang, dan Dr. Jainuri (Cand), M.Si, dosen senior Prodi IP selaku perwakilan dari akademisi.

Kerjasama ini langsung dihadiri dan ditandatangani oleh Bupati Dompu, Drs.H. Bambang M. Yasin, dan Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan, Salahudin, S.IP, M.Si, M.P.A. Nota Kesepahaman antara Prodi Ilmu Pemerintahan dengan Pemerintah Kabupaten Dompu meliputi bidang Penelitian, Pengabdian, serta Magang Riset.

Harapannya, sebagai lembaga pendidikan, Prodi Ilmu Pemerintahan bisa ikut berkontribusi membangun daerah, sekaligus membangun bangsa dan negara Indonesia. Penandatanganan Kesepakatan ini juga dihadiri oleh Dekan FISIP, Dr. Rinikso Kartono, M.Si, yang sekaligus membuka acara Seminar Nasional. []

Siap Meng-Global, Prodi IP Selenggarakan Pelatihan Jurnal Nasional dan Internasional

Dalam rangka mewujudkan *World Class University*, sebuah Universitas harus menunjukkan eksistensinya di tingkat global. Eksistensi tersebut salah satunya dibuktikan dengan produktivitas penelitian dan penulisan oleh para dosen dengan publikasi karya ilmiahnya. Salah satunya adalah keaktifan dalam menulis jurnal, baik



Dosen IP UMM dalam Sesi Foto Bersama Peserta Penulisan Jurnal Internasional

jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional bereputasi.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Prodi Ilmu Pemerintahan memiliki strategi yakni, menggelar "Workshop Penulisan Artikel Ilmiah Untuk Jurnal Nasional Terakreditasi dan Jurnal Internasional Bereputasi (Kamis, 10/05) di Hotel UMM Inn.

Kegiatan ini terselenggara dengan dukungan dari AIPPTM, ADIPSI, dan KAPSIPI selaku mitra kerja dari Prodi Ilmu Pemerintahan.

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari ke depan dibuka langsung oleh Ketua AIPPTM, Prof. Dr. Nurmandi, M.Sc., yang juga menjadi pemateri dalam acara tersebut. Peserta workshop adalah dosen dari berbagai Universitas di Indonesia. Materi pertama disampaikan oleh Zulfatman, Ph.D yang memberikan ilmu tentang *Publication and Citation Metrics*. Selanjutnya, materi tentang Teknik Penulisan *Literature Review* yang disampaikan oleh Prof. Dr. Nurmandi, M.Sc, yang memberikan kiat-kiat atau trik-trik khusus dalam membuat *Literatur Review* agar dapat

diterima di Jurnal nasional bereputasi dan Jurnal Internasional terakreditasi. Workshop ini sangat membantu peserta dalam membuat Artikel Ilmiah. Seperti yang disampaikan oleh peserta dari Universitas Palangkaraya, Bapak Saifulah Darlan, "dulu, sebelum tahu teknik membaca cepat Jurnal, membuat *Literature Review* bisa satu bulan satu jurnal, sekarang bisa dengan cepat membuat *Literature Review*", tegasnya.

Selain menjadi tuan rumah, Prodi Ilmu Pemerintah juga menjadi peserta Penulisan Jurnal tersebut. Kegiatan ini sebagai bentuk strategi Prodi Ilmu Pemerintahan untuk siap mengglobal bersaing, dan tentunya mewujudkan visi Universitas menjadi *world class university*. []

Dosen Ilmu Pemerintahan Melakukan Workshop "Penguatan Kelembagaan Satlinmas dan Evaluasi Pengamanan Penyelenggaraan Pemilu"

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang yang tergabung dalam program pengabdian masyarakat internal (PPMI) melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di Kelurahan Temas, Kota Batu. Program pengabdian masyarakat di tahun 2018 melakukan workshop "Penguatan Kelembagaan Satlinmas dan Evaluasi Pengamanan Penyelenggaraan Pemilu" dilaksanakan pada hari jumat tanggal 6 Juli 2018 di halai kelurahan Temas.

Workshop dilakukan untuk memberikan penguatan tentang struktur kelembagaan dan tugas fungsi dan satlinmas sesuai dengan Permendagri No 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat. Acara dihadiri oleh Perangkat Kelurahan,



Dosen IP UMM selepas Acara Sosialisasi di Kelurahan Temas. Tentang Kelembagaan Satlinmas

Kasatgas Satlinmas beserta 20 anggota satlinmas kelurahan Temas, dan Babinkamtibnas Kelurahan Temas. Workshop dibuka dengan sambutan dari ketua pengabdian dan Bapak Bambang selaku Lurah dari Kelurahan Temas. Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi tentang struktur kelembagaan serta tupoksi satlinmas berdasarkan

permendagri.

Acara dilanjutkan dengan melakukan evaluasi tentang kendala satlinmas dalam melakukan penyelenggaraan keamanan pemilu. Evaluasi dilakukan dengan melakukan diskusi dan dialog antara satlinmas dan tim pengabdian tentang kendala dalam melakukan penyelenggaraan pengamanan pemilu di kelurahan Temas. Acara ditutup dengan sesi foto bersama antara tim pengabdian, perangkat kelurahan dan anggota satlinmas. []

Kiprah Mahasiswa

Prodi IP Melakukan Sosialisasi Peningkatan Iklim Akademik Mahasiswa

Menindaklanjuti surat edaran dari universitas, Prodi Ilmu Pemerintahan menggelar rapat koordinasi percepatan kelulusan Mahasiswa. Koordinasi yang dihadiri oleh Dosen dan Mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan ini digelar di ruang sidang FISIP-UMM, Sabtu 14 Juli 2018. Acara dibuka



Mahasiswa Antusias Mendengarkan Arahan dari Kaprodi IP

oleh Ka. Prodi Ilmu Pemerintahan sekaligus memberikan motivasi kepada para mahasiswa untuk segera menyelesaikan studi dan tugas akhir/skripsi tepat waktu.

Acara koordinasi dilanjutkan oleh Dr. Asep Nurjaman, M.Si selaku Dosen Ilmu Pemerintahan dan Kepala Perpustakaan UMM dan

Muhammad Kamil, S.IP, MA, yang mendorong mahasiswa untuk segera menyelesaikan kendala akademik dan penyelesaian tugas akhir. Mereka berdua juga meminta mahasiswa untuk proaktif berkoordinasi dan bekerjasama dengan Prodi untuk menyelesaikan permasalahan akademik dan tugas akhir.

Koordinasi percepatan kelulusan mahasiswa dilanjutkan dengan dialog antara dosen dan mahasiswa berkaitan dengan permasalahan akademik dan penyusunan skripsi. Dialog antar mahasiswa dan dosen dilakukan untuk mengakomodir permasalahan dan perkembangan mahasiswa dalam menempuh studi serta kendala dalam menyelesaikan tugas akhir. []

Prodi IP Launching Government English Club (GEC)

Senin 4 Juni 2018 Prodi IP FISIP-UMM menggelar launching Government English Club (GEC). Bertempat di ruang sidang Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMM kegiatan launching dibuka dengan acara talkshow dengan tema Pilkada, Demokrasi dan Diskriminasi Pemilih. Acara ini dihadiri oleh ketua GEC Elizabeth Maya yang juga menjadi narasumber dalam acara talkshow tersebut. Acara talkshow juga dihadiri oleh pengurus dan anggota GEC, mahasiswa serta dosen di lingkungan Prodi Ilmu Pemerintahan.

Perlu di ketahui bahwa Government English Class (GEC) merupakan fasilitas yang disediakan oleh Prodi



Pengurus GEC Prodi Ilmu Pemerintahan Tahun 2018

IP FISIP-UMM untuk mengembangkan minat dan bakat mahasiswa, terutama dalam pengembangan bahasa asing (Inggris). Maka tidak heran jika launching Government English Club yang dikemas dalam bentuk talkshow mewajibkan setiap peserta untuk menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar.

Dalam acara talkshow tersebut narasumber dan peserta mendiskusikan tentang hak-hak kaum difabel untuk memilih dalam pesta demokrasi yang akan datang yaitu Pilkada 2018. Acara ini ditutup dengan pengenalan Government English Club dan pengenalan anggota kepengurusan Government English Club tahun 2018. []

mendiskusikan tentang hak-hak kaum difabel untuk memilih dalam pesta demokrasi yang akan datang yaitu Pilkada 2018. Acara ini ditutup dengan pengenalan Government English Club dan pengenalan anggota kepengurusan Government English Club tahun 2018. []

Makin Berkemajuan, HIMAP Gelar Kajian Keilmuan

Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMAP) menggelar kajian keilmuan bertajuk "Eksistensi Partai Politik Dalam Membentuk Kader Yang Kompeten." Kegiatan ini bertujuan untuk membangun dan membentuk karakter mahasiswa yang kritis dan cerdas. Di samping itu, acara yang diselenggarakan di BAU UMM, Rabu (16/5), adalah sebagai wujud eksistensi HIMAP dalam menyelenggarakan diskusi-diskusi ilmiah sekaligus melatih kepemimpinan mahasiswa.

Hadir sebagai narasumber, Direktur Malang Corruption Watch (MCW), Lutfi Jayadi Kurniawan dan Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan bidang kajian Partai Politik, Iradhad Taqwa Sihidi. Kedua narasumber memberikan ilmu tentang pentingnya Peran Partai Politik



Anggota HIMAP bersama melakukan sesi Foto Bersama setelah acara selesai

dalam mencetak kader yang kompeten. Sehingga, peran partai politik sangat vital dalam menjangkau dan mencetak kader yang akan menduduki jabatan di eksekutif maupun legislatif. Peran mahasiswa juga penting dalam memilih kandidat-kandidat yang ditawarkan oleh Partai Politik, sekaligus mengawal jalannya proses demokratisasi.

Kajian keilmuan ini tentunya mendapat dukungan dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Wujud dukungannya adalah hadir Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan, Salahudin, S.IP, M.Si, M.P.A, yang memberikan motivasi kepada mahasiswa Ilmu Pemerintahan sekaligus membuka acara diskusi. Harapannya, diskusi-diskusi epistemik seperti ini bisa berkesinambungan, dimana HIMAP yang menjadi roda penggerak kajian ilmiah. []

HIMAP Gelar Talkshow Bertajuk PILKADA dan Pembangunan Daerah

Relasi linear antara pilkada dan pembangunan daerah selalu menjadi topik aktual untuk didedeh secara teoritis dan praksis. Pilkada dibentuk salah satunya untuk meningkatkan akselerasi pembangunan di daerah sebab disinyalir mampu menghadirkan pemimpin yang representatif dalam melayani kepentingan publik. Asumsi teoritis tersebut perlu pembuktian dalam realitas politik kontemporer dengan melihat sejauhmana pilkada berhasil membuat peningkatan kesejahteraan di daerah.

Keterkaitan itulah berusaha dipotret dalam kegiatan Talkshow Pemerintahan Prodi Ilmu Pemerintahan UMM, Kamis (7/6/2018) bertempat di ruang sidang Senat FISIP UMM. Program Talkshow merupakan salah satu forum organik intelektual berkesinambungan yang selain menjadi forum dialektika ilmiah bagi mahasiswa juga jembatan untuk mempersiapkan mahasiswa IP UMM menjadi pengamat politik dan pemerintahan yang handal dalam ruang-ruang publik.

Untuk edisi pembuka ini, menghadirkan mahasiswa IP



Anggota HIMAP sebagai Pembicara dalam acara Talkshow

UMM; Hendri selaku pengamat politik lokal, Danang Kurniawan sebagai pengamat kebijakan publik dan Tia Marwah selaku pengamat pembangunan daerah. Dalam pemaparannya, Hendri menyoroti urgensi pilkada secara historikal sehingga menjadi model elektoral di daerah. Alasan paling mendasarnya ialah kepala daerah yang dipilih langsung memberikan kedaulatan mutlak

bagi masyarakat. Danang lebih menitikberatkan pada fakta-fakta empiris pelaksanaan pilkada yang telah berlangsung dari tahun 2005. Meskipun pilkada sarat dengan berbagai macam persoalan seperti kecurangan, politik uang, korupsi, dan lain-lain pilkada tetap perlu didukung dengan cara melakukan perbaikan dalam aspek regulasi dan perilaku aktor. Sedangkan Tia Marwah lebih fokus pada fakta bahwa pilkada kerap tidak berhasil menciptakan pemimpin daerah yang mampu membawa agenda-agenda perbaikan kesejahteraan dimasyarakat. Korupsi kepala daerah dan kemiskinan yang tetap tinggi adalah bukti sah yang ditunjukkan. []

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP UMM terlibat dalam event Pertukaran Bahasa dan Budaya Indonesia Jepang

Mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan Rico Ratna Setiawan Angkatan 2017 terlibat sebagai peserta dalam ajang pertukaran Bahasa dan Budaya Indonesia-Jepang yang diselenggarakan oleh Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA) UMM pada 13 Agustus 2018. Kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa dari beberapa Universitas di Jepang diantaranya Wako University, Tokushoku University, Meiji Gakuin, Waseda University and Nihon University of Japan.

Kegiatan yang bertujuan untuk memperkenalkan budaya dan bahasa dari masing-masing negara



dilaksanakan di Aula Sidang Senat Universitas Muhammadiyah Malang diharapkan memperkuat kerjasama Internasional dan mengembangkan *student exchange* antara UMM dengan Universitas di Jepang. Pertukaran mahasiswa merupakan cara untuk menumbuh-kembangkan potensi dan jiwa masa depan mahasiswa UMM agar dapat terus berkiprah di kancah Internasional. Belajar menari, Bahasa

Indonesia, Mematik dan juga permainan tradisional nusantara adalah tajuk yang dikenalkan kepada mahasiswa Jepang. Upayanya, potensi lokal dan kekhasan daerah Indonesia melalui UMM dapat mengglobal. []

UPAYA PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE (Studi Kasus Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang)

Permasalahan birokrasi yang ada di Indonesia tidak hanya pada pemberian pelayanan kepada masyarakat. Tetapi juga, akan penyelewengan wewenang dalam bentuk KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), masih banyak lagi permasalahan yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Salah satunya dengan melakukan perbaikan terhadap birokrasi menjadi hal yang sangat penting karena menyangkut pada kepentingan masyarakat.



Oleh: Iwan Hasliansyah

Kondisi saat ini dalam penyelenggaraan pemerintahan desa masih menghadapi sejumlah tantangan dan kendala. Terutama pemerintah daerah untuk harus turut mendampingi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sejumlah kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa saat ini diantaranya masih rendahnya efektivitas kelembagaan dan tata kelola pemerintahan desa serta pelayanan masyarakat.

Selain itu, rendahnya kapasitas dan kualitas pelayanan aparatur pemerintahan desa, masih terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan desa, serta masih lemahnya koordinasi antar Kementerian/Lembaga dan pemda dalam pembinaan desa.

Persoalannya di Indonesia ini dengan 74 Ribu lebih desa di Indonesia, sedangkan keberadaan Balai Besar Pemerintahan Desa di Indonesia hanya 3 balai yaitu balai Malang, Yogyakarta dan Lampung. Jika kita melihat dengan keberadaan 3 balai di Indonesia secara perhitungan tidak masuk akan dalam menyelesaikan peningkatan/pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa di seluruh Indonesia.

Berkaitan dengan pentingnya upaya pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa, pemerintah pusat (Kemendagri) melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa membentuk unit pelaksanaan teknis di bidang pemerintahan desa yang cuma ada 3 tempat di Indonesia yaitu Balai Besar Pemerintahan Desa Yogyakarta, Lampung dan Malang. Balai Besar memiliki peran sangat penting dalam mempercepat dan mensosialisasi kebijakan-kebijakan dari Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa yaitu upaya pengembangan kapasitas aparatur desa. Salah satunya Balai Besar Pemerintahan Desa Malang dengan wilayah kerja Indonesia Timur turut untuk mendukung terciptanya kualitas sumber daya aparatur pemerintah desa untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik (*Good Governance*).

Berdasarkan hasil monitoring khususnya di Indonesia Timur permasalahan di pemerintahan desa selama ini, ada beberapa permasalahan pemerintahan desa di Indonesia Timur yaitu "perencanaan/penganggaran desa, keuangan desa, kebijakan desa, manajemen pelayanan desa, kepemimpinan kepala desa," ucap Edy Supriyanta selaku kepala Balai Besar Pemerintahan Desa Malang. Penyebabnya, lebih dikarenakan kurangnya kemampuan dan pengetahuan aparatur desa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2016 Pasal 23 Tentang Balai Pemerintahan Desa adalah Unit Pelaksanaan di Bidang Pemerintahan Desa melaksanakan fungsi yaitu Pelaksanaan pelatihan di bidang penataan dan administrasi pemerintahan desa, Pelaksanaan pelatihan di bidang kelembagaan dan kerjasama desa, serta keuangan dan aset desa, Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawain, keuangan, administrasi umum, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga.

Upaya Balai Besar Pemerintahan Desa Malang Dalam Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Untuk

Mewujudkan *Good Governance* yaitu dengan dilakukan pelatihan Penataan Pemerintahan Desa, Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, Administrasi Pemerintahan Desa, Kerjasama Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Adapun upaya Balai Besar Pemerintahan Desa Malang dalam pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam mewujudkan *good governance*. Ada beberapa indikator tata kelola pemerintahan desa yang baik dengan mengacu pada beberapa karakteristik *good governance* dengan indikator-indikator nya 1) Transparansi (*Openness and Transparency*); 2) Partisipasi Masyarakat (*Participation*); 3) Akuntabilitas/Tanggung Gugat (*Accountability*); 4) Supremasi Hukum (*Rule of Law*).

Good Governance adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga "kesenergian" interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Sehingga bertujuan terciptanya kondisi pemerintahan yang baik serta akan memberi dampak baik kepada seluruh lapisan masyarakat. Tujuan dari *good governance* sendiri adalah penyelenggaraan pemerintah yang baik, pengelolaan pelayanan administrasi yang baik, pengelolaan keuangan yang baik dan terselenggaranya pembangunan.

Dari upaya yang dilakukan Balai Besar Pemerintahan Desa Malang dapat kita simpulkan bahwa terdapat empat indikator dalam pemerintahan yang baik sebagai berikut yaitu: pertama transparansi adalah transparansi dari pemerintah yang bertujuan untuk bagaimana masyarakat mendapatkan informasi mengenai pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan dari pemerintah, Kedua partisipasi masyarakat adalah seluruh lapisan masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pembuatan dan pengambilan keputusan, ketiga akuntabilitas adalah pemerintah yang membuat keputusan dan pengambilan keputusan di pemerintahan dan dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat, dan keempat Supremasi Hukum adalah Pemerintah disini harus tegas menegakkan soal hukum-hukum yang berlaku.

Jadi disini, Balai Besar Pemerintahan Desa Malang dengan upaya pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa guna mewujudkan *good governance*. Oleh karena itu, hal tersebut terus dilakukan melalui pelatihan-pelatihan agar dalam penyelenggara pemerintahan desa dapat transparansi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas/tanggung gugat dan supremasi hukum. Hal ini menjadi acuan Balai Besar Pemerintahan Desa Malang yang nantinya membawa dampak positif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih baik. []

INOVASI PELAYANAN BAGI ANAK PENYANDANG AUTIS

(Studi Program Pelayanan Anak Autis pada Bidang Pendidikan Di Pusat Layanan Autis Kota Blitar)

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan yang penting bagi masyarakat dan pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakatnya. Di era desentralisasi, pendidikan merupakan urusan wajib yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Pelayanan pendidikan harus merata dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk bagi penyandang autis. Autisme sendiri merupakan gangguan perkembangan pada anak yang ditandai dengan adanya gangguan dan keterlambatan dalam bidang kognitif,



Oleh: Greta Oseja

bahasa, perilaku, komunikasi, dan interaksi sosial.

Menurut data UNESCO pada tahun 2011, sekitar 35 juta orang di dunia merupakan penyandang autis dan rata-rata 6 dari 1000 orang di dunia mengidap autisme. Sedangkan di Indonesia, belum ada data atau angka pasti mengenai jumlah pengidap autisme. Namun demikian data di atas menunjukkan suatu kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Apabila tidak ditangani dengan tepat tentunya akan berdampak pada masa depan anak tersebut. Oleh karena itulah diperlukan perhatian dan

peningkatan pelayanan pendidikan bagi anak autis, baik melalui sekolah ataupun model pelayanan yang menawarkan jasa pelayanan terapi bagi anak penyandang autis.

Salah satu upaya pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan pendidikan yang merata bagi anak autis yakni adanya suatu inovasi dari pemerintah dengan mendirikan Pusat Layanan Autis (PLA) atau *Autis Center*. Kota Blitar merupakan salah satu pemerintah daerah yang memiliki Pusat Layanan Autis. PLA di Kota Blitar secara resmi didirikan pada maret 2015 berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Blitar No/188/941/HK/410.010.2/2014 Tentang Tim Pengelola Pusat Layanan Autis Kota Blitar. Pada tahun 2015 jumlah anak penyandang autis yang mengikuti pendidikan di PLA Kota Blitar berjumlah 68 jiwa, pada tahun 2016 meningkat jumlahnya menjadi 168 jiwa, dan pada tahun 2017 meningkat lagi dengan peserta didik berjumlah 220 jiwa. Berdasarkan data tersebut kenaikan jumlah anak penyandang autis ini cukup memprihatinkan, namun disisi lainnya Maka kehadiran PLA praktis sangat membantu para orang tua yang memiliki anak penyandang autis

Pendirian PLA di Kota Blitar juga merupakan inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Blitar khususnya Dinas Pendidikan Kota Blitar dalam memberikan atau menyediakan pelayanan pendidikan bagi anak penyandang autis. Hal ini dikarenakan, selama ini pendidikan bagi anak autis yang diselenggarakan oleh Sekolah Luar Biasa (SLB) masih dirasa kurang. Pendidikan di SLB memang hanya sekedar pendidikan umum semata. Biaya terapi penyandang autis relatif mahal dan untuk tarif terapi berkisar antara Rp 50.000-Rp 500.000 per jam, padahal, pasien perlu terapi minimal 6-10 jam per minggu. Oleh karena itu kehadiran PLA di Kota Blitar sangatlah membantu bagi masyarakat di Kota Blitar yang memiliki anak penyandang autis dan kurang mampu.

Inovasi pelayanan publik melalui hadirnya PLA Kota Blitar merupakan upaya dari pemerintah Kota Blitar

untuk memperluas akses pelayanan publik, Biaya pelayanan autis yang jauh lebih murah dibandingkan dengan swasta serta memberikan kesempatan bagi semua kalangan untuk dapat mengakses pelayanan pendidikan anak autis. PLA Kota Blitar juga hadir untuk memperbaiki pelayanan pendidikan bagi anak autis yang dirasa masih kurang. Pelayanan yang diberikan oleh PLA Kota Blitar memiliki segi kebaruan dan perbedaan dengan pelayanan pendidikan autis di tempat lain. Perbedaannya terutama dari segi kelengkapan produk pelayanan yang disediakan oleh PLA Kota Blitar. Dalam praktiknya PLA Kota Blitar memiliki dua layanan yakni layanan umum dan layanan utama.

Layanan umum diperuntukkan bagi masyarakat non peserta didik yang berupa layanan konsultasi *parenting* bagi orang tua atau masyarakat dan penelitian bagi mahasiswa atau peneliti. Sedangkan pelayanan khusus terdiri atas beberapa pelayanan yang antara lain yaitu layanan kegiatan harian terapis, kegiatan makan peserta didik, kegiatan bina diri, kegiatan *grouping*, kegiatan jasmani adaptif, kegiatan *pool therapy*, kegiatan *daily living*, kegiatan *leisure therapy*, kegiatan terapi music, kegiatan kelas transisi dan kegiatan senam yoga

Berdasarkan inovasi yang telah dilakukan oleh PLA Kota Blitar dalam pelayanan pendidikan bagi anak autis masih memiliki beberapa faktor penghambat diantaranya kurangnya informasi kelembagaan melalui *website* PLA Kota Blitar dan kurangnya sumber daya manusia atau pegawai yang memadai. Untuk itu diperlukan upaya untuk memperbaiki dan mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut. Sehingga diharapkan kedepannya inovasi yang dilakukan oleh PLA Kota Blitar dapat semakin meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan bagi penyandang autis. Oleh karena itu, dalam konteks dukungan regulasi pemerintah Kota Blitar dan DPRD Kota Blitar perlu bersinergi dalam rangka merumuskan kebijakan dalam bentuk Perda tentang penyandang disabilitas. []

PROFIL DAN INFORMASI PENDAFTARAN PRODI ILMU PEMERINTAHAN

JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN

Visi Menjadikan Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-UMM sebagai pusat pendidikan yang unggul dalam pengembangan ilmu serta praktik pemerintahan bertaraf internasional untuk mendukung terwujudnya *Effective Government* sebagai pengejawantahan nilai-nilai Islam.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan untuk mengembangkan pola pikir, wawasan, dan keterampilan mahasiswa di bidang Ilmu Pemerintahan yang berorientasi pada pemerintahan daerah (*local government*) yang berdaya saing internasional.
2. Mengembangkan riset dan kajian Ilmu Pemerintahan untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif (*effective government*).
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat sipil (*civil society*).
4. Meningkatkan jaringan kelembagaan yang berbasis teknologi komunikasi dan informasi (TKI).
5. Meningkatkan kompetensi keilmuan dan keterampilan pemerintahan bagi mahasiswa agar berdaya saing internasional dan berakhlak mulia.

Tujuan Pembelajaran :

1. Menguasai dasar-dasar Ilmu Pemerintahan dan keterampilan dasar bidang Pemerintahan.
2. Mampu mengidentifikasi permasalahan di Bidang Pemerintahan.
3. Mampu menceklistipikan dan menganalisis permasalahan pemerintahan secara komprehensif dan akurat.

4. Menguasai prinsip dasar demokrasi guna mewujudkan masyarakat sipil yang berdaya (*civil society*).
5. Memiliki kepekaan dan tanggung jawab etik dalam mengemban amanah sebagai ilmuwan dan praktisi Ilmu Pemerintahan.

Tempat Pendaftaran :

UPT PMB Universitas Muhammadiyah Malang
Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang 6514, Telp. 0341-464318-19 Psw. 139,
Fax. 0341-460435, 460782, e-mail: pmb@umm.ac.id.

Pendaftaran on-line : pmb.umm.ac.id, call center: +62 341 463513.

Jalur Pendaftaran :

Program Jalur Undangan/ Jalur Prestasi & UMDK; Program Reguler; Program Beasiswa Khusus Yatim / Yatim-Patu; Program Beasiswa FPU1; Program Transfer dan Alih Jenjang

Prosedur Pendaftaran :

- a. Mengisi biodata peserta secara *online* pada pmb.umm.ac.id
- b. Melakukan pembayaran secara transfer melalui BNI No. Rek. 6006002464 (Tidak menerima transfer pembayaran via ATM/SMS Banking/ e-Banking)
- c. Formulir cetak *online* dan semua berkas syarat pendaftaran dimasukkan dalam amplop coklat dan dikirim ke alamat: UPT PMB Universitas Muhammadiyah Malang Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang 65144
- d. Pengiriman Berkas pendaftaran melalui pos dan *cepat*.